



KR GROUP
http://www.krjogja.com

Kedaulatan Rakyat

Suara Hati Nurani Rakyat

Terbit Sejak 27 September 1945



BERLANGGANAN
SCAN BARCODE



RABU LEGI

1 NOVEMBER 2023 (16 BAKDAMULUD 1957 / TAHUN LXXIX NO 35)

HARGA RP 4.000 / 16 HALAMAN

PROF DR INAJATI ADRISIJANTI TERIMA ANUGERAH KEBUDAYAAN 2023 Budaya Jangan Kehilangan Relevansi, Tumbuhkan Kultur Baru



KR-Franz Boedikusumanto

Gubernur DIY Sri Sultan HB X didampingi Kepala Dinas Kebudayaan DIY Dian Lakshmi Pratiwi menyerahkan Anugerah Kebudayaan 2023 kepada Prof Dr Inajati Adrisijanti di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta.

YOGYA (KR) - Sebanyak 25 pelaku seni budaya di DIY meliputi pelestari atau pelaku, pelopor, pembaharu dan kreator, lembaga, media, dan kategori khusus, terpilih menerima Anugerah Kebudayaan 2023 yang diserahkan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (31/10).

Pemberian Anugerah Kebudayaan ini berdasarkan Pedoman Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang termaktub dalam Keputusan Gubernur Nomor 127 Tahun 2018.

"Anugerah Kebudayaan Gubernur merupakan bentuk apresiasi dan uca-

pan terima kasih Pemda DIY atas nama masyarakat DIY, terhadap komitmen, aksi nyata, serta konsistensi para pelaku dan pelestari budaya di DIY. Sehingga, kepada para penerima penghargaan besar harapan saya agar apa yang diterima tidak dipandang dari nilai materialnya semata. Melainkan sebagai simbol niat baik dan dukungan kami, untuk terus berkarya dan 'berjuang' di bidang yang telah dipilih," kata Sultan HB X.

Dari 25 penerima Anugerah Kebudayaan Tahun 2023, Komisaris Utama PT BP Kedaulatan Rakyat Prof Dr Inajati Adrisijanti mendapatkan Anugerah Kebudayaan Tahun 2023

* Bersambung hal 7 kol 5

Pemeriksaan Hakim MK Dilakukan Tertutup Denny Desak Perkara 90 Diperiksa Ulang

JAKARTA (KR) - Pemeriksaan terus dilakukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait laporan masyarakat atas Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada Selasa (31/10) petang. MKMK memeriksa Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman secara tertutup.

Anwar Usman tiba di ruangan pemeriksaan, di Lantai 4 Gedung II MK Jakarta sekitar pukul 16.10 WIB. Anwar diperiksa secara tertutup oleh tiga anggota MKMK yang terdiri Jimly Asshiddiqie, Wahiduddin Adams, dan Bintang R. Saragih.

Sebelum memasuki ruang pemeriksaan, Anwar Usman sempat menjawab pertanyaan wartawan terkait dirinya yang mendapat laporan terbanyak dari masyarakat atas putusan mengenai syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Namun Anwar mengaku tidak memperlakukan karena menilai itu sebagai



KR-Antara/M Risyaf Hidayat

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie berjanjian meninggalkan ruangan usai memimpin jalannya sidang di Gedung II Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (31/10/2023).

konsekuensi ketua MK. "Ya, saya kan ketua (MK)," tuturnya singkat.

Selain Ketua MK Anwar Usman, MKMK juga memeriksa Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Pemeriksaan kepada Arief dilakukan di tempat yang sama dengan pemeriksaan kepada

Ketua MK Anwar Usman, yakni di Gedung II MK, Jakarta. Pantauan di lokasi, Arief tiba di halaman gedung tersebut pada pukul 17.24 WIB.

Sebelum masuk ke lokasi pemeriksaan, Arief yang tampak mengenakan setelan jas berwarna abu-abu

dan kemeja berwarna hitam itu sempat menjawab pertanyaan awak media. Ia mengaku akan memberikan keterangan terkait seluruh hal yang ia ketahui ketika memeriksa dan memutuskan perkara syarat usia capres dan cawapres itu.

* Bersambung hal 7 kol 5

DUGAAN PENYALAHGUNAAN TKD

Kejati DIY Selidiki Dua Kasus Baru

YOGYA (KR) - Penyalahgunaan Tanah Kas Desa (TKD) dengan alasan apapun tidak dibenarkan. Oleh karena itu, penyidikan terhadap kasus mafia TKD di wilayah DIY sampai saat ini masih terus dilakukan.

Bahkan, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY sedang menyelidiki dugaan penyelewengan perizinan pemanfaatan TKD di Maguwoharjo Depok dan Candibinangun Pakem. Untuk prosesnya sedang menunggu keterangan saksi ahli.

"Ada lagi (kasus TKD) nanti berkembang untuk Maguwoharjo dan Candibinangun juga dalam proses. Perkembangan saat ini tinggal menunggu keterangan ahli, setelah itu langsung kita limpahkan ke pengadilan," kata Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DIY Ponco Hartanto di Kompleks Kepatihan, Selasa (31/10).

Saat disinggung soal kemungkinan keterlibatan eks Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispartaru) DIY Krido Suprayitno, Ponco mengungkapkan, segala kemungkinan bisa saja. Pasalnya, penyalahgunaan tanah kas desa terjadi saat yang bersangkutan (Krido) masih menjabat sebagai Kepala Dispartaru DIY. Kendati demikian untuk mengetahui terlibat atau tidak harus disertai fakta-fakta yang kuat (berhasil ditemukan tim penyidik).

"Kalau masalah itu (keterlibatan Krido) kita lihat saja nanti di persidangan untuk lebih pastinya. Tapi dengan melihat, pak Krido itu kan Kepala Dispartaru yang punya

* Bersambung hal 7 kol 1

DALAM PILPRES 2024

Gus Yahya Larang Semua Pihak Bawa Nama NU

JAKARTA (KR) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf melarang semua pihak membawa nama NU dalam ajang Pilpres 2024. Kendati demikian ia mengatakan, PBNU tidak melarang warganya untuk berpartisipasi memberikan dukungan ke salah satu pasangan calon presiden.

"Prinsipnya, apapun tindakan dukung mendukung dalam Pilpres mendatang tidak boleh membawa-bawa NU, apalagi pengurusnya. Misal, atas nama NU saya mendukung calon ini, calon itu. Tidak boleh," ujarnya usai konferensi pers terkait situasi konflik Palestina dan Israel di Gedung PBNU, Jakarta, Selasa (31/10).

Kendati demikian ia mengatakan PBNU tidak melarang warganya untuk berpartisipasi memberikan dukungan ke



KR-Antara/Sigid Kurniawan
Yahya Cholil Staquf

salah satu pasangan calon presiden. "Kami tidak bisa menghalangi hak pribadi-pribadi untuk berpartisipasi, itu silakan. Tapi tidak boleh mengatasnamakan NU," tegas Gus Yahya.

Terkait keputusan Yenny Wahid yang menyatakan dukungannya kepada pasangan calon presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024, Gus Yahya mengaku belum mengetahui posisi dukungan Yenny Wahid terhadap pasangan itu. "Kalau memang posisinya resmi, misalnya jadi tim sukses, itu ada aturan-aturan. Tapi kalau cuma pribadi tidak jadi apa-apa, hanya sebagai rakyat, ya kita tidak bisa halangi," tuturnya.

Saat ini Yenny Wahid merupakan pengurus aktif di organisasi PBNU sebagai Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU 2022-2027. (Ant)-f

SOAL PUTUSAN USIA CAPRES-CAWAPRES

Anwar Usman Klaim Tak Ada Lobi

JAKARTA (KR) - Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menegaskan tidak ada lobi-melobi dalam memeriksa dan memutuskan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Kalau ada proses lobi-melobi, maka hasil putusan perkara yang diajukan oleh warga negara Indonesia (WNI) bernama Almas Tsaqibbirru Re A. tersebut tidak akan seperti itu.

"Enggak ada, lobi-lobi gimana? Sudah baca putusannya belum?," kata Anwar Usman kepada awak media setelah sidang tertutup dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) usai di Gedung II MK Jakarta, Selasa (31/10) petang.

Sementara itu, terkait dirinya yang tidak mengundurkan diri ketika memeriksa perkara tersebut sehingga dikaitkan dengan konflik kepentingan dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming yang merupakan ponakannya, Anwar mengatakan sebuah jabatan telah diatur oleh Tuhan. "Yang menentukan jabatan milik Allah Yang Maha Kuasa," ucapnya

Sebelumnya, kuasa hukum salah satu pelapor, Viola Reininda mengatakan bahwa Anwar Usman telah melakukan lobi kepada delapan hakim konstitusi lainnya. "Keterlibatan di sini dalam arti yang bersangkutan

* Bersambung hal 7 kol 5

JADWAL SALAT	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
	11:26	14:39	17:37	18:48	03:52

Rabu, 1 November 2023

Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY

Analisis Politik Anti-Budaya

Indra Tranggono



POLITIK ada yang berbudaya dan ada yang anti-budaya, untuk tidak mengatakan nir-budaya. Politik berbudaya selalu tegak lurus pada nilai-nilai kebudayaan. Misalnya menjunjung etika dan moral. Juga konsistensi terhadap konstitusi. Sedangkan politik anti-budaya adalah politik yang menyimpang dari etika dan moralitas. Juga inkonsisten terhadap konstitusi.

Politik anti-kebudayaan memosisikan kekuasaan satu-satunya tujuan. Cara apapun ditempuh. Termasuk mengakali konstitusi demi kepentingan jangka pendek. Misalnya mengubah ketentuan undang-undang terkait pemilu, dengan menambahkan norma baru.

* Bersambung hal 7 kol 1

Erick Thohir Dukung Prabowo



KR-Antara/Dhemas Revilyanto
Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) bersama bakal calon presiden Prabowo Subianto usai pertemuan.

kungannya kepada Prabowo juga karena ia meyakini bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu dapat menjadikan Indonesia lebih maju ke depannya. "Saya ingin menjadi bagian untuk Indonesia yang tentu lebih besar lagi, lebih maju lagi,

lebih baik lagi," kata Erick. Sementara itu, Prabowo, yang mengenakan atasan khasnya baju safari berwarna kuning gading, menyampaikan ia dan Erick terbiasa bekerja bersama-sama, karena masuk dalam kabinet yang sama, yaitu Kabinet Indonesia

Maju pimpinan Presiden RI Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin.

"Terima kasih Pak Erick, diterima di rumah. Ini kehormatan besar. Saya dan Pak Erick sudah kerja sama dalam kabinet. Justu bidangnya saya banyak dibantu Pak Erick,

didukung, didorong dan Alhamdulillah, terima kasih beliau menawarkan untuk

* Bersambung hal 7 kol 1

SUNGGUH SUNGGUH TERJADI

● TANGGAL 24 Oktober 2023 saya mengantarkan kakak untuk cukur rambut di Jalan Kaliurang Km 9 Yogyakarta. Saat itu ada seorang simbah antre. Sang cukur rambut bertanya: "Cukuripun model pripon mbah?". Mbahnya menjawab: "Rambutku kari lima, dicukur kaya tentara wae.... mas". Sang pencukur rambut pun mencukur sesuai permintaan simbah. Setelah selesai... mbahnya berkata dan berkomentar: "Waaah... tambah bagus, mesthi cewek-cewek padha naksir karo aku!". (Titeek T. SPd, Jalan Melati 5 No 284 Perum Condongcatur Yogya).-f

Baby Homecare
RS Happy Land Medical Centre

Baby Treatment
Pijat Bayi | Rawat Tali Pusar | Memandikan Bayi

Pijat Laktasi

Informasi dan Pendaftaran: 0811 2822 303